

**KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI
BENCANA KEBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

Muhammad Fiqra. S
NPP. 29.0362

*Asdaf Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: Muhammad.fiqra1508@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem where disasters are unpredictable but can still be prevented and anticipated, especially forest fires which have become an annual agenda during the dry season, therefore the role of the government and the community is needed. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the performance and inhibiting factors of BPBD performance and to determine BPBD's efforts in Tanjung Jabung Barat Regency in dealing with factors that hindered the implementation of forest fire disaster mitigation in Tanjung Jabung Barat Regency, Jambi Province. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of the performance theory of Agus Dwiyanto. Data collection techniques using in-depth interviews (17 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** Facilities and infrastructure owned by the Regional Disaster Management Agency of Tanjung Jabung Barat Regency are still very lacking. This can be seen from the obstruction of BPBD in accessing the location of the forest fire disaster. In addition, the number of facilities and infrastructure used in disaster mitigation is still small. **Conclusion:** That the performance of the BPBD of Tanjung Jabung Barat Regency is generally good and continues to make progress towards improving services to the community. The author provides criticism and suggestions for the Regional Disaster Management Agency of Tanjung Jabung Barat Regency to continue to improve towards a better direction to answer the demands of the community.

Keywords: Disaster, BPBD, Forest Fire, Performance

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan dimana bencana merupakan hal yang tidak dapat diprediksi namun masih bisa dicegah danantisipasi terutama bencana kebakaran hutan yang sudah menjadi agenda tahunan saat musim kemarau, oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dan masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja dan faktor-faktor penghambat kinerja BPBD serta mengetahui upaya BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menangani faktor penghambat pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran hutan di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori kinerja dari Agus Dwiyanto Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (17 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari terhambatnya BPBD dalam mengakses lokasi bencana kebakaran hutan. Selain itu sarana dan prasarana yang digunakan dalam mitigasi bencana jumlahnya masih sedikit. **Kesimpulan:** Bahwa kinerja BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara garis besar sudah baik dan terus melakukan perkembangan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penulis memberikan kritik dan saran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar terus berbenah kearah lebih baik lagi untuk menjawab tuntutan masyarakat.

Kata Kunci: Bencana, BPBD, Kebakaran Hutan, Kinerja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mempunyai kekayaan hutan yang luas membuat Indonesia menjadi Negara dengan tingkat rawan bencana alam yang besar, khususnya bencana akan kebakaran hutan yang awalnya dianggap biasa dan lama kelamaan itu menjadi sebuah bencana bagi Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab akan hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan tersebut dapat diartikan juga perlindungan terhadap bencana oleh pemerintah kepada warga negaranya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Prabencana dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Dalam penelitian ini penulis mengambil fokus penelitian pada klasifikasi prabencana dalam proses mitigasi bencana kebakaran hutan. Upaya dalam mitigasi itu sendiri menyusun strategi-strategi daerah yang bertujuan untuk mitigasi bencana yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah mitigasi tersebut, disesuaikan dengan peraturan yang telah disahkan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang terjadi setiap tahun terutama pada musim kemarau. Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah aktifitas manusia dalam upaya pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar inilah yang sering menjadi titik awal merambatnya api sehingga menimbulkan gangguan di berbagai sektor yang disebabkan pengaruh asap hasil pembakaran. Dari 9 kabupaten yang terdapat pada Provinsi Jambi, pada tahun 2020/2021 Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi kabupaten yang memiliki titik panas rawan bencana kebakaran hutan tertinggi di Provinsi Jambi. Menurut grafik hotspot Provinsi Jambi pada periode 1 Januari sampai 18 Juli tahun 2021 kemarin menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki grafik hotspot tertinggi di provinsi Jambi yaitu sejumlah 135 titik api. Sebagian besar wilayah hutan yang diisi dengan hutan gambut membuat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mudah sekali bermunculan titik hotspot, terlebih lagi pada saat musim kemarau. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki luas wilayah 5.009,82 km, dengan pembagian wilayah sebanyak 13 kecamatan. Letak geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat ialah

0°53-01°41 LS dan antara 101°23- 104° 21 BT. Adapun batas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatauan langsung dengan Provinsi Riau disebelah utara ,selatan dengan kab batang hari , sebelah barat dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo, sebelah timur dengan selat berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Beberapa bencana tercatat pernah terjadi di kabupaten tanjung jabung barat, antara lain meliputi banjir, cuaca ekstrim/gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran gedung dan pemukiman serta kebakaran hutan dan lahan, seringkalinya bencana – bencana tersebut terjadi, menyebabkan perlu adanya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana. Upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana, terutama bencana kebakaran hutan. Untuk menangani hal tersebut kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jambi dianggap penting untuk dievaluasi. bukan hanya pada tingkat Provinsi saja akan tetapi di setiap Kabupaten dianggap juga perlu dibentuk guna mengoptimalkan peran dari BPBD itu sendiri sehingga lebih cepat tanggap akan segala hal yang bersangkutan dengan kewenangan BPBD tersebut. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana dengan menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana, yang fokus utamanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian pelatihan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi yaitu Menurut grafik hotspot Provinsi Jambi pada periode 1 Januari sampai 18 Juli tahun 2021 kemarin menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki grafik hotspot tertinggi di provinsi Jambi yaitu sejumlah 135 titik api. Sebagian besar wilayah hutan yang diisi dengan hutan gambut membuat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mudah sekali bermunculan titik hotspot, terlebih lagi pada saat musim kemarau. Beberapa bencana tercatat pernah terjadi di kabupaten tanjung jabung barat, antara lain meliputi banjir, cuaca ekstrim/gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran gedung dan pemukiman serta kebakaran hutan dan lahan, seringkalinya bencana – bencana tersebut terjadi, menyebabkan perlu adanya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana. Upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana, terutama bencana kebakaran hutan. Daerah yang mengalami resiko sangat rawan kebakaran hutan tersebut berada pada Kecamatan Senyerang, Kecamatan Batang Asam, dan Kecamatan Batara. Kecamatan yang berada di tingkat rawan ialah kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Betara. Kemudian pada tingkatan sedang yang terdapat di Kecamatan Kuala Betara, Renah Mendaluh dan Muara Papalik dan daerah yang tergolong aman dari bencana kebakaran hutan terdapat pada Kecamatan Seberang Kota, Merlung, Tebing Tinggi dan Teluk Nilau. Untuk menangani hal tersebut kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jambi dianggap penting untuk dievaluasi. bukan hanya pada tingkat Provinsi saja akan tetapi di setiap Kabupaten dianggap juga perlu dibentuk guna mengoptimalkan peran dari BPBD itu sendiri sehingga lebih cepat tanggap akan segala hal yang bersangkutan dengan kewenangan BPBD tersebut. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana dengan menyelenggarakan pelatihan penanggulangan bencana

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Penelitian Andre Efroza berjudul *Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Alam di Kabupaten Langkat*, menemukan bahwasannya Kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam sudah cukup baik, akan tetapi belum maksimal karena tidak semua indikator terpenuhi.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Iskandar yang berjudul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya Badan Penanggulangan Bencana Telah Melaksanakan tugas, namun masyarakat ada yang mengikuti dan ada yang tidak mengikuti arahan dari BPBD dalam mencegah dan menanggulangi jika kebakaran terjadi.

Penelitian berikutnya yaitu dari Anwar Mursyadad yang berjudul *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Lebak* yang berkesimpulan bahwasannya kinerja yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lebak telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku dan dapat diikuti oleh masyarakat dalam rangka pencegahan bencana.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya, selain itu lokasi penelitian yang dilakukan berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Berbeda dari Andre Efroza, Iskandar, Anwar Mursyadad. Selain itu BPBD kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran penting dalam menyiapkan masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana, yang ditindak lanjuti dengan membangun sistem penanganan darurat terhadap bencana secara cepat, efektif dan efisien, dan membangun budaya siap siaga terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan bencana, serta menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana dan membantu penyaluran bantuan dari tata logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan faktor-faktor penghambat kinerja BPBD serta mengetahui upaya BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menangani faktor penghambat pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

II METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ini. Menurut Sukmadinata (2005:18), "penelitian deskriptif tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang. Menurut Sugiyono (2013:245) cara kerja induktif tidak seperti menyusun yang bentuk akhirnya sudah diketahui, tetapi menemukan bentuk utuh dan bermakna hasil dari gambar-gambar yang ditemukan pada saat mengumpulkan data. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 17 orang Simangunsong (2017:230) menuliskan bahwa data adalah kumpulan datum dari banyaknya fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab

pertanyaan penelitian.informan yang terdiri dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi, Kepala Sub Bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala Sub Bagian Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Staff BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Masyarakat (sebanyak 10 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi menggunakan teori dari Agus Dwiyanto. Teori tersebut memiliki 5 indikator dalam mengukur kinerja yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Produktivitas

Kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memberikan pelayanan dengan hasil yang memuaskan dengan mengukur produktivitas kinerja OPD tersebut. Produktivitas akan mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan. Hasil Efisiensi pelayanan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini dapat dikatakan sudah baik namun belum dapat dikatakan optimal karena masih terdapat kendala-kendala dalam pencapaian kinerja BPBD. Penulis juga menyimpulkan hal-hal yang membuat kinerja BPBD belum dapat dikatakan optimal dikarenakan masih ditemukan permasalahan, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan adanya peraturan mengenai bencana kebakaran hutan. Produktivitas dengan mengukur tingkat Efektivitas pelayanan publik, dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Selaras dengan fungsi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat apakah pemerintah sudah efektif dalam memberikan pelayanan. minimnya jumlah anggota yang bertugas berpengaruh kepada keefektivan pelaksanaan tugas dalam mitigasi bencana Kebakaran Hutan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka dari itu, menindak lanjuti hal ini upaya yang dilakukan yaitu dengan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat bersama-sama ikut serta dalam penanggulangan bencana.

3.2 Kualitas Layanan

Kualitas layanan dapat diartikan bagaimana BPBD dalam menjalankan perannya sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang dimiliki apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atautkah masih perlu ada peningkatan. Dalam mengukur kualitas layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten tanjung Jabung Barat penulis mengambil 2 indikator keberhasilan, yaitu kemudahan & kejelasan informasi yang diberikan dan kepuasan masyarakat. BPBD dalam memberikan pelayanan sudah maksimal sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BPBD sebagaimana tertulis dalam pengaturannya. Penulis juga menemukan bahwa kesiapan dalam menghadapi bencana ditandai dengan petugas selalu siap sedia kapanpun dan dimanapun agar semua berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

3.3 Resposivitas

Dengan mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ini menyebutkan bahwa pada Pasal 21 salah satu tugas dari Badan Penanggulangan Bencana ialah sebagai penyusun dan menetapkan prosedur daya tanggap terhadap bencana dan penyusunan prosedur penanganan bencana. BPBD mempunyai agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program yang diperuntukkan untuk kebutuhan dan menumbuhkan rasa aman dalam masyarakat. dikuatkan juga dengan Rencana Strategis yang dirancang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017-2022 dengan mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja BPBD dalam memberikan pelayanan.

3.4 Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menentukan standar berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang semakin menguatkan semua kegiatan akan berjalan sesuai dengan kesesuaian program dengan prosedur dan kecakapan anggota dalam mitigasi bencana kebakaran hutan yang berlaku. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugasnya dalam mengatur dan menangani masyarakat sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Dalam hal ini, guna untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Undang-undang dan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3.5 Akuntabilitas

Seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para stakeholders. Kemudian diperlukan juga kontribusi dari masyarakat dalam melihat kinerja dari organisasi tersebut. Jadi untuk mengukur akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mitigasi bencana kebakaran hutan diperlukan indikator Pertanggungjawaban BPBD & Kontrol Masyarakat untuk memastikan bahwa sudah sesuai dengan pengaturan yang seharusnya. Dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwasanya semua pengaturan dan kebijakan yang telah diprogramkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai mitigasi bencana kebakaran hutan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana mestinya. Dari hal ini penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilakukan dengan baik.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi kebakaran hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa dari segi produktivitas sudah cukup baik tapi belum optimal dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui peraturan terkait. Selanjutnya dari dimensi Kualitas Layanan sudah maksimal sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BPBD. Kemudian dari dimensi Responsivitas sudah berusaha mengenali kebutuhan masyarakat dengan menyusun agenda sesuai kebutuhan dilapangan. Dari dimensi Responsibilitas pekerjaan yang dilakukan instansi terkait telah sesuai dengan peraturan & ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir dari dimensi Akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah sesuai dengan pengaturan yang seharusnya. Dari 5 indikator tersebut secara keseluruhan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mitigasi bencana kebakaran hutan sudah cukup baik walaupun mesti tetap ditingkatkan kembali.

Program ini sudah berjalan cukup efektif seperti temuan Andre Efroza (Andre Efroza, 2017) namun program ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu Masalah teknis dan non teknis. Dari segi teknis berupa sarana prasarana yang masih terbatas dan untuk faktor non teknis berkaitan dengan pemahaman masyarakat, medan yang dilalui dan tanah di Kabupaten Tanjung Barat yang berjenis gambut.

Selain itu, penelitian ini berbeda dari penelitian Iskandar (Iskandar, 2020) dimana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memberikan pelatihan kepada anggota mitigasi agar lebih profesional jika mendesak dan tidak adanya sarana dan prasarana. Selain itu juga memberikan perawatan yang maksimal kepada sarana dan prasarana yang telah ada.

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi kebakaran hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mempunyai kekurangan lain dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu perjalanan atau akses menuju lokasi mitigasi sangat susah di tempuh karena kurangnya tenaga profesional ataupun tempat pelaksanaan program mitigasi yang dilakukan tidak semua dapat ditempuh dengan mudah sehingga banyak memakan waktu seperti temuan Anwar Mursyadad (Anwar Mursyadad, 2015).

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi kebakaran hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini yaitu terkait perjalanan atau akses menuju lokasi mitigasi sangat susah di tempuh karena kurangnya tenaga profesional ataupun tempat pelaksanaan program mitigasi yang dilakukan tidak semua dapat ditempuh dengan mudah sehingga banyak memakan waktu. Selain itu keterbatasan jumlah personil dalam mitigasi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dan juga pemahaman kepada masyarakat harus di berikan terus menerus agar adanya pemahaman kepada masyarakat. Hal lain yang menjadi penghambat dalam penelitian ini adalah Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari terhambatnya BPBD dalam mengakses lokasi bencana kebakaran hutan. Selain itu sarana dan prasarana yang digunakan dalam mitigasi bencana jumlahnya masih sedikit.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara garis besar sudah baik dan terus melakukan perkembangan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penulis memberikan kritik dan saran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar terus berbenah kearah lebih baik lagi untuk menjawab tuntutan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Agus Dwiyanto.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi kebakaran hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Dwiyanto, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Galang Printika Yogyakarta.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: .Alfabeta.
- Sukmadinata, N. 2005. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.